

**PARTISIPASI POLITIK  
ORANG TIONGHOA DI INDONESIA  
PADA PERIODE 1998-1999  
LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA**

*Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai  
salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra*

oleh

**RANGGA PERMANA**

**NIM : 95112016**



**JURUSAN SASTRA CINA  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

# **PARTISIPASI POLITIK ORANG TIONGHOA DI INDONESIA PADA PERIODE 1998-1999 LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA**

oleh

**Rangga Permana**

Sejak dari kedatangannya yang pertama di Indonesia, orang-orang Tionghoa secara sadar atau tidak sadar sudah memperkenalkan kebudayaannya kepada masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, secara sadar atau tidak sadar bangsa Indonesia sudah memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu diantara dua golongan masyarakat yang berbeda yaitu antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah terjadi interaksi sosial-budaya yaitu jaringan hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia yang menjadi syarat dalam kehidupan bermasyarakat mereka.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah Kolonial Belanda ataupun pemerintah Indonesia, keduanya sama-sama menjadi salah satu sebab keterpisahan antara etnis Tionghoa dengan etnis Indonesia. Kebijakan pemerintahan kolonial dengan politik *separatismenya* (pemisahan kelompok-kelompok dalam masyarakat) ternyata membuat masyarakat Tionghoa menjadi



semakin jauh dari masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan kebijakan *asimilasi* (proses penyesuaian atau pembauran golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan tertentu ke dalam golongan lain dengan kebudayaan yang berbeda sedemikian rupa sehingga sifat khas dan identitas kebudayaan golongan terkecil lambat laun berkurang dan bahkan menjadi menghilang) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru, bukannya membuat orang Tionghoa menjadi dekat dengan orang Indonesia, tetapi malah membuat jarak yang semakin jauh di antara kedua golongan masyarakat tersebut.

Akibat dari kebijakan-kebijakan yang selalu merugikan orang Tionghoa di Indonesia, banyak dari orang-orang Tionghoa di Indonesia yang tidak peduli dengan keadaan negara Indonesia, sebagian dari mereka lebih memilih bergelut pada bidang ekonomi dari pada mengurus masalah negara yang selalu menjadikan mereka sebagai "kambing hitam" dari setiap permasalahan.

Sesuai dengan berjalannya waktu, pada masa reformasi yaitu masa dimana terjadi perubahan di segala bidang kehidupan ini, kembali masyarakat Tionghoa memperlihatkan kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia. Ada sebagian dari orang-orang Tionghoa tersebut yang secara terang-terangan terjun langsung dalam sebuah partai politik, yaitu misalnya Nurdin Purnomo.

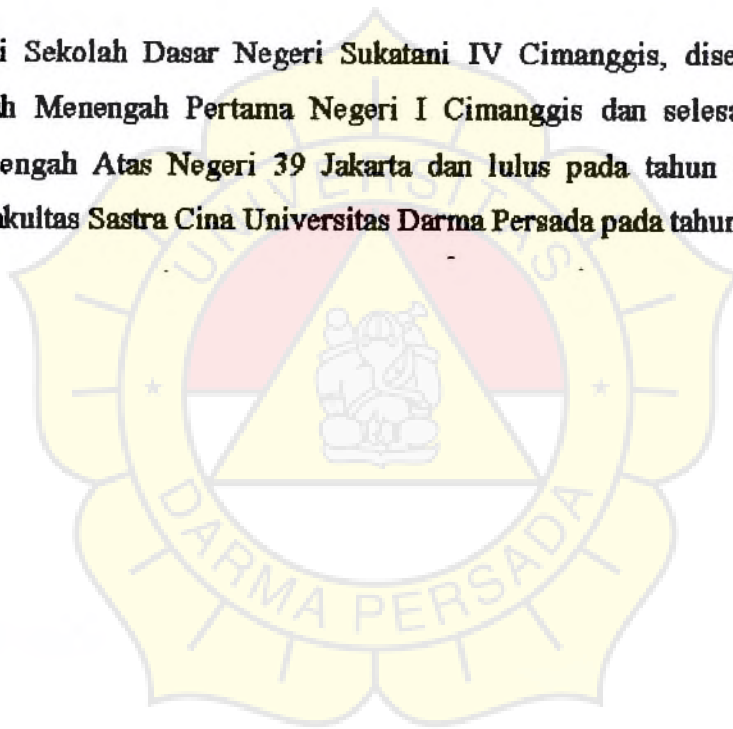
Nurdin Purnomo adalah seorang keturunan Tionghoa yang dengan rasa nasionalismenya, pada tanggal 11 Juni 1998 mendeklarasikan berdirinya Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dengan dia sendiri sebagai Ketua Umumnya. Yang lebih menarik lagi adalah Nurdin Purnomo yang seorang Tionghoa yang selain berhasil memimpin partainya yang multietnik yaitu partai yang terdiri dari berbagai suku di Indonesia, tidak saja orang Tionghoa yang menjadi anggota, tetapi orang Indonesia sendiri banyak yang ikut serta menjadi simpatisan dan bahkan banyak juga yang menjadi anggota, Nurdin juga berhasil membawa partainya mengikuti Pemilu tanggal 7 Juni 1998.

Hal-hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang keberadaan seorang keturunan Tionghoa dalam dunia politik di Indonesia.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1976, anak kedua dari Muchtar dan Siti Nurlela.

Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sukatani IV Cimanggis, diselesaikan tahun 1989; Sekolah Menengah Pertama Negeri I Cimanggis dan selesai tahun 1992; Sekolah Menengah Atas Negeri 39 Jakarta dan lulus pada tahun 1995; menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Cina Universitas Darma Persada pada tahun 1995.



Skripsi yang berjudul

**PARTISIPASI POLITIK  
ORANG TIONGHOA DI INDONESIA  
PADA PERIODE 1998-1999  
LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA**

oleh  
**Rangga Permana**  
**NIM : 95112016**

disetujui untuk diujikan dalam sidang ujian Skripsi Sarjana, oleh :

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Bahasa dan Sastra Cina

Pembimbing



**Priyanto Wibowo, M. Hum**



**Priyanto Wibowo, M. Hum**



Skripsi yang berjudul

**PARTISIPASI POLITIK  
ORANG TIONGHOA DI INDONESIA  
PADA PERIODE 1998-1999  
LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA**

telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 10 Agustus 2001 di hadapan

Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra

Pembimbing/Penguji



**Priyanto Wibowo, M.Hum.**

Ketua Panitia/Penguji



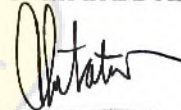
**Dra. Inny C Haryono, M.A.**

Penguji



**Gustini, S.S.**

Pembaca/Penguji



**Dewi Hartati, S.S.**

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Sastra Cina



**Priyanto Wibowo, P.Hum.**

Dekan Fakultas Sastra



**Dra. Inny C Haryono, M.A.**

Skripsi Sarjana yang berjudul :

**PARTISIPASI POLITIK  
ORANG TIONGHOA DI INDONESIA  
PADA PERIODE 1998-1999  
LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA**

merupakan karya ilmiah yang penulis susun di bawah bimbingan Priyanto Wibowo, M. Hum ini tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis sendiri. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya di Jakarta, 31 Juli 2001.

Materai  
3000

**RANGGA PERMANA**



Mama...

terimalah sembah sujud ananda, yang baru sekarang mampu mempersembahkan sedikit dari apa yang selama ini engkau do'a dan harapkan.

Dan untuk seorang wanita yang selalu ada dikala aku sedih dan gembira, tidak akan aku kenang dia karena dia selalu ada dihatiku.

..... ya Allah lindungi kedua wanita ini, sayangi mereka dan terangilah selalu jalan mereka karena mereka selalu sempurna bagi diriku.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi yang sejak tahun 1999 penulis susun ini, telah selesai. Skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI POLITIK ORANG TIONGHOA DI INDONESIA PADA PERIODE 1998-1999 : LAHIRNYA ORGANISASI TIONGHOA”** ini, penulis susun guna memenuhi sebagian syarat yang harus penulis selesaikan untuk memperoleh gelar sarjana sastra pada Fakultas Sastra di Universitas Darma Persada.

Berbagai halangan sering penulis temukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetapi dengan dorongan dan bantuan berbagai pihak, seperti kedua orang tua penulis, dosen pembimbing, para dosen, dan juga tidak ketinggalan keluarga dan rekan-rekan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikannya pada tahun 2001 ini. Semua pihak sangatlah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini terutama ditujukan untuk :

1. Ibu Dra. Inny C Haryono, M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra dan juga kepada para staff pimpinan Fakultas Sastra.
2. Bapak Priyanto Wibowo, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Sastra Cina, PA penulis sejak tahun 1999 sampai sekarang. Beliau juga dosen pembimbing penulis, beliau selalu sabar membimbing penulis dengan memberikan berbagai masukan baik itu mengenai pencarian data-data maupun mengenai penyusunannya.
3. Ibu Dewi Hartati, SS, selaku dosen pembaca skripsi penulis.
4. Ibu Gustini, SS, selaku dosen penguji skripsi penulis.

5. Ibu Yulie Nella Chandra, SS, selaku PA penulis sejak tahun 1995 sampai tahun 1999.
6. Bapak Prop. Dr. Gondomono, Ph.D, Purek I Universitas Darma Persada karena beliau adalah penulis dapat tetap bertahan pada tema skripsi ini dan beliau juga banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kepada seluruh dosen-dosen Jurusan Sastra Cina
8. Seluruh staff Sekretariat Fakultas Sastra
9. Seluruh staff perpustakaan Japan Fondation, perpustakaan Universitas Darma Persada, perpustakaan Universitas Pajajaran, perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan Universitas Gajah Mada, perpustakaan Nasional, dan toko buku Gramedia Matraman.
10. Secara khusus kepada keluarga tercinta yang selama ini sangatlah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Papa dan Mama sangatlah besar jasanya, karena doa, dorongan, dan kasih sayang beliau berdualah skripsi ini terbentuk. Kakakku Heni, Wawan dan ponakanku Feby. Adik-adikku Wiwi, Yuni dan Novi, walaupun mereka sedikit mengganggu tetapi justru malah menambah semangat penulis untuk tetap mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan juga kepada Alm. Abah Mahari dan Almh. Emak Diah, Kepada Emak Bedah dan seluruh keluarga yang tercinta lainnya.
11. Ucapan ribuan terima kasih juga penulis ucapkan kepada "Eva Duma Tambunan". Ia seorang wanita yang sejak tahun 1996 selalu setia, menyayangi, menemani, dan membimbing penulis sehingga berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Kepada seluruh keluarga besar Tambunan, tante, om dan David.
13. Bapak Nurdin Purnomo, selaku Ketua Umum Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Beliau banyak membantu penulis dalam pemberian data penting yang menyangkut partisipasi orang Tionghoa dalam dunia politik Indonesia.
14. Bapak Hariender Singh, selaku Wakil Sekjen Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Beliau telah membantu penulis dalam pencarian data tentang PBI.



15. Buat semua rekan-rekan Fakultas Sastra, terutama angkatan '95.
16. Buat rekan-rekan Sastra Cina angkatan 1995, 1996, 1997, dan 1998.
17. Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan "NEVAN" Nia, Nuri, Evi, Eni, dan Ndari.
18. Buat sahabat-sahabat sejati "BOCOR" Parto, Ronald, Mono, Kiting, Lontong, Danu, Bayu, dan Alm. Sahriyan,
19. Buat sahabat-sahabat sejati "AKON" Caing, Achel, Theo, Lue, Tito, Leboy, Bango, Achong, Gundu, Arab, dan Penyok.
20. Buat sahabat-sahabat dalam keluarga besar "KOST BOJONG" Bronnson H, Cibon, Romy H, Syaid, Kunkel, Ettok, Jeppry, Panjul, Fadli S, Chairul, Agung, Evans, Tablo, Bang Zul, Bang John, Okto, Fahmi, Farid G, Sarkomi, Kadir, Alhuda, Mone, Made, Bobby, M.Isal, Sensei, Jaya, dan Latif.
21. Khusus buat Sayid Ashari, terima kasih banyak atas pinjaman printernya.
22. Buat Ramski, terima kasih nemenin penulis begadang sambil ngecekin tulisan skripsi ini.
23. Yang terakhir buat seluruh rekan-rekan penulis dimanapun kalian berada.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Seluruh isi dan susunan skripsi merupakan tanggung jawab penulis, dan untuk itu penulis mengharapkan kritik, komentar dan tanggapan yang membangun dari para pembaca.

Jakarta, Juli 2001

Rangga Permana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
I.1. : Latar Belakang Penulisan.....	1
I.2. : Permasalahan.....	4
I.3. : Ruang Lingkup Penulisan.....	8
I.4. : Maksud dan Tujuan Penulisan.....	9
I.5. : Hipotesa Penulisan.....	10
I.6. : Metode Penulisan.....	10
I.7. : Sistematika Penulisan.....	11
I.8. : Sistem Ejaan.....	12
<b>BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ORANG TIONG-HOA PADA MASA KOLONIAL SAMPAI AKHIR MASA ORDE BARU</b>	
II.1. : Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Orang Tionghoa.....	13
II.2. : Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Orang Tionghoa di Indonesia Setelah Merdeka Sampai Akhir Masa Orde Baru.....	21



<b>BAB III</b>	<b>: KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIEBIE</b>	
III.1.	: Tragedi 13-15 Mei 1998 dan Hubungannya Dengan Masyarakat Tionghoa.....	39
III.2.	: Kebijakan Presiden B.J. Habibie Terhadap Orang Tionghoa di Indonesia.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>: PARTAI BHINNEKA TUNGGAL IKA INDONESIA : SALAH SATU BENTUK PARTISIPASI POLITIK ORANG TIONGHOA DI INDONESIA</b>	
IV.1.	: Partisipasi Politik Orang Tionghoa di Indonesia.....	51
IV.2.	: Pro dan Kontra Diantara Tokoh-Tokoh Tionghoa Mengenai Organisasi Tionghoa di Indonesia.....	54
IV.3.	: Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia.....	57
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	: Penutup.....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....		73
<b>LAMPIRAN</b> .....		76

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Penulisan

Jauh sebelum orang-orang Portugis maupun orang-orang Belanda datang di pulau Jawa, para pedagang Tiongkok telah mondar mandir datang di, dan pergi dari Nusantara dan bahkan sudah ada yang bermukim di pelbagai daerah. Mereka menyebar dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur, bekerja sebagai buruh-buruh pertambangan, perkebunan, dan sebagai pedagang. Bila diketemukan tambang kekayaan alam maka mereka berduyun-duyun mendatangi tambang tersebut untuk bekerja, bahkan mereka akan membentuk *koloni-koloni* (perkampungan) tersendiri pada daerah pertambangan tersebut, terutama di pantai Utara pulau Jawa. Ketika kapal dagang Belanda yang pertama mengunjungi Teluk Jakarta pada tahun-tahun terakhir abad keenam belas, di dekat Teluk Jakarta sudah ada pemukiman orang-orang Tionghoa. Pada awal abad ketujuh belas lebih banyak orang Tionghoa yang datang ke Indonesia sebagai pekerja, pada mulanya sebagian dipaksa oleh Belanda dan sebagian besar lagi secara sukarela mencari nafkah di "Batavia" yang baru saja didirikan oleh Belanda.<sup>1</sup>

Ketika kehidupan di Nusantara terbukti lebih baik dan memberi harapan yang cerah dari pada di tanah airnya sendiri pada waktu itu, maka banyak imigran Tionghoa yang berdatangan dalam jumlah besar ke Indonesia, tanpa kaum perempuannya, karena para imigran Tionghoa yang rata-rata pria ini, pada awalnya mereka masih merencanakan untuk kembali ke negeri Tiongkok apabila mereka sudah mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak untuk hari tuanya, namun lama-kelamaan mereka meninggalkan gagasan untuk kembali ke tanah asalnya. Mereka

---

<sup>1</sup> Lih. Prop. Dr. Gondomono, Ph D, *Membaritng Tulang Menyembah Arwah : Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm.2.



kemudian malah hidup dengan perempuan-perempuan setempat dan menetap di Indonesia untuk selama-lamanya. Satu hal lagi yang menarik tentang alasan kenapa wanita-wanita Tionghoa sedikit sekali yang melakukan migrasi karena para kaum pria Tionghoa tidak mau melepaskan wanita-wanita Tionghoa untuk bersuamikan pria Indonesia. Tetapi ada juga dari sebagian wanita-wanita Tionghoa tersebut bersuamikan pria Indonesia.<sup>2</sup>

Sebenarnya asimilasi ini, sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, misalnya pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memperoleh pengaruh-pengaruh ajaran Hindu. Dan dalam proses perkembangan ini terjadi pula perkawinan campuran antara para pendatang dengan wanita-wanita Indonesia atas pengaruh-pengaruh agama. Orang Indonesia banyak yang merasa mendapat kehormatan bila mendapat menantu orang Hindu ataupun orang Islam. Lain halnya dengan orang-orang Tionghoa yang tidak mempunyai konsep agama dan konsep ke-Tuhan-an, melainkan menganut ajaran Konfusius ini, mereka mengawini wanita-wanita Indonesia karena pemikiran praktis, yaitu untuk membantunya berdagang.

Karena proses asimilasi ini, akhirnya mereka membentuk komunitas yang merupakan kesatuan sosial, terutama terikat oleh kesadaran wilayah sendiri yang makin lama makin berbeda secara kultural dengan masyarakat leluhur Tionghoa. Maka terbentuklah sebuah kelompok yang banyak dalam tulisan disebut sebagai

<sup>2</sup> Lih. W.D. Sukisman, *Masalah Cina di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penelitian Masalah Asia, 1975), hlm.15. Wanita-wanita Tionghoa di kawini oleh pemuka-pemuka Indonesia, kebanyakan dari kalangan atas Indonesia-lah wanita-wanita Tionghoa dikawini, bahkan sampai dekat sebelum Perang Dunia ke II adalah menjadi kebiasaan para Bupati, untuk memiliki istri orang Tionghoa, disamping istri orang Indonesia asli (dan kadang-kadang masih ada istri keturunan Arab). Sejumlah kecil perempuan Tionghoa dapat meninggalkan Tiongkok pada akhir abad ke-19. Lihat, misalnya, Lim Joo Hock, "The Chinese Female Immigration into the Straits Settlements, 1860-1901", *Journal of the South Seas Society* (Nanyang xue bao), Vol.22 (1967), hlm.58-110. Juga, Joyce EE, "Chinese Migration to Singapore, 1896-1941", *Journal of Southeast Asian History*, Vol.2, No.1 (1961), hlm.33-51. Di Amerika Utara dan Australasia, imigran kaum perempuan dihentikan menjelang abad ke-19 dan tidak muncul lagi sampai Perang Dunia II ; lih. Charles A. Price, *The Great White Walls Are Built : Restrictive Immigration to North America and Australasia, 1836-1888* (Canberra : Australian National University Press, 1974), hlm.106-109, 215-277. Lihat juga Prop. Dr. Gondomono, Ph.D, *Membanting Tulang Menyembah Arwah : Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm.2



golongan "peranakan", namun dalam tulisan ini, atas alasan istilah yang biasa digunakan sehari-hari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa di Indonesia penulis lebih memilih istilah "orang Tionghoa". Kaum imigran yang datang pada abad kesembilan belas sampai awal tahun 1930-an banyak yang membawa anak dan istrinya sehingga mereka pun membentuk komunitas sendiri yang biasanya disebut orang "Tionghoa Totok", yang secara kultural lebih akrab dengan budaya leluhur mereka daripada golongan "peranakan".<sup>3</sup>

Dalam proses asimilasi yang dilakukan orang-orang Tionghoa dengan masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial sampai saat ini tidak begitu saja terjadi, tetapi orang-orang Tionghoa tersebut perlu pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Bila orang-orang Tionghoa berasimilasi dengan penguasa setempat (Kolonial Barat pada waktu itu), tentu status sosial orang-orang Tionghoa tersebut akan menjadi lebih tinggi. Tetapi sebaliknya bila orang-orang Tionghoa berasimilasi dengan masyarakat Indonesia, maka status sosial orang-orang Tionghoa tersebut akan menjadi lebih rendah. Kebanyakan dari orang-orang Tionghoa tersebut lebih memilih berasimilasi dengan penguasa setempat daripada orang-orang Tionghoa tersebut berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Proses asimilasi akan terjadi dengan sendirinya di kalangan orang-orang Tionghoa kalau tidak ada faktor-faktor penghalang tersebut, yang orang-orang Tionghoa sendiri sadar atau tidak sadar telah membantu menciptakannya.<sup>4</sup>

Sementara situasi politik di Indonesia dan di Tiongkok maupun hubungan antara kedua negara itu mengalami banyak perubahan setelah Perang Dunia II usai,

<sup>3</sup> Di sini penulis tidak menggunakan istilah "peranakan" dan "totok" untuk orang-orang Tionghoa yang sudah melakukan pembauran dengan masyarakat setempat atau sebaliknya tidak melakukan pembauran, sebagai sebuah konsep akademik, melainkan menggunakan istilah "orang Tionghoa" kecuali bila pada situasi tertentu dimana penulis harus menjelaskan tentang salah satu dari dua kelompok yang berbeda ini atau harus menjelaskan perbedaan mereka maka penulis akan menambahkan julukan-julukan seperti di atas yaitu 'peranakan' dan 'totok' sebagaimana hal itu pada umumnya di mengerti dan dipergunakan sehari-hari. Begitu juga halnya mengenai istilah "pribumi" untuk orang-orang Indonesia asli, penulis hanya menggunakan istilah "orang Indonesia".

<sup>4</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.35.



orang-orang Tionghoa di Indonesia pun harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru tersebut. Kelompok orang Tionghoa yang termasuk ke dalam *stratum socio-legal* (lapisan masyarakat yang sesuai Undang-Undang) yang lebih tinggi daripada orang Indonesia selama zaman penjajahan Belanda, sekarang menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Orang-orang Indonesia telah menjadi tuan di rumahnya sendiri, dan semua Warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban dan derajat yang sama menurut Undang-Undang Dasar. Orang-orang Tionghoa wajib memilih salah satu kewarganegaraannya, yaitu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Sejak itulah masalah-masalah antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Indonesia timbul. Masalah, yang sebenarnya bukanlah masalah akhirnya menjadi suatu masalah yang sangat besar, hal tersebut juga tidak terkecuali karena campur tangan pemerintah Indonesia yang terlalu membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil bagi orang-orang Tionghoa.<sup>5</sup>

## 1.2. Permasalahan

Sejak dari awal kedatangannya di Indonesia, orang-orang Tionghoa secara sadar atau tidak sadar telah merubah adat istiadatnya yang sangat tradisional, begitu pun sebaliknya dengan bangsa Indonesia sendiri secara sadar ataupun tidak sadar bangsa Indonesia juga sudah mengalami perubahan adat-istiadat. Kebudayaan Tionghoa secara langsung atau tidak langsung telah menyerap kebudayaan dari masyarakat Indonesia, begitupun sebaliknya masyarakat Indonesia secara langsung atau tidak langsung juga sudah menyerap kebudayaan masyarakat Tionghoa.

---

<sup>5</sup> Dalam masa Orde Baru ini, muncul istilah "masalah Cina", tidak ada sebuah definisi yang jelas mengenai "masalah Cina" ini. Lih. I Wibowo, ed, *Retrospekti dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 1999), hlm 13. Juga lihat, W.D. Sukisman, *Masalah Cina di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penelitian Masalah Asia, tanpa tahun), hlm.75.

Pengaruh-pengaruh kebudayaan luar ini, telah merubah Indonesia di semua bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial-budaya, agama, ataupun bidang politik.

*Strata sosial* (tingkat, kedudukan dalam masyarakat) orang-orang Indonesia yang pada saat zaman Kolonial dulu berada di tingkat paling dasar, bahkan berada di bawah orang-orang Tionghoa, hal tersebut membuat orang-orang Indonesia selalu mempunyai rasa cemburu terhadap orang-orang Tionghoa, begitu pun sebaliknya kebanyakan dari orang-orang Tionghoa yang merasa strata sosialnya berada di atas orang-orang Indonesia, membuat mereka selalu *mengeksklusifkan diri* (terpisah dan tersendiri) Segala bidang kehidupan orang-orang Tionghoa tersebut selalu merasa berbeda dengan bangsa Indonesia, merasa lebih baik dari orang-orang Indonesia. Banyak dari orang-orang Tionghoa tersebut, mendirikan organisasi-organisasi yang berorientasi ke negeri Tiongkok, seperti Tiong Hoa Hwee Koan (Tiong Hua Hui Guan), Siang Hwee (Xiang Hui), Soe Po Sia (Xu Po Xia) dan Sin Po (Xin Po). Atau ada juga dari mereka yang mendirikan organisasi-organisasi politik yang cenderung condong ke Hindia Belanda, seperti Chung Hwa Hui (Chong Hua Hui).<sup>6</sup>

Berbeda halnya, dengan orang-orang Tionghoa lainnya yang merasa bahwa mereka juga bagian dari bangsa Indonesia ini, mereka tidak memperdulikan masalah status sosial, bahkan mereka bersama-sama masyarakat Indonesia bahu-membahu berperang melawan penjajah, dalam hal ini adalah bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Orang-orang Tionghoa banyak mendirikan atau bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang sifatnya politik, seperti Partai Tionghoa Indonesia (PTI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Boediei Oetomo, Partai Indonesia Raya (Parindra), Gabungan Politik Indonesia (Gapi), dan masih banyak yang lainnya.<sup>7</sup>

Begitu Perang Dunia II selesai, situasinya menjadi sangat berbeda, orang-orang Tionghoa yang memiliki stratum sosial-legal yang lebih tinggi dari orang-orang

<sup>6</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Terj. Wulandari Supardan (Jakarta : Grafiti Press, 1984), hlm. 43-56.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3-16



Indonesia, sekarang berada di bawah orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri, bahkan semua orang Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama menurut Undang-Undang Dasar. Orang-orang Tionghoa wajib memilih status kewarganegaraannya, menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Walaupun demikian, hal tersebut justru menambah semangat juang orang-orang Tionghoa yang pandangan politiknya cenderung membela Indonesia, sehingga lebih banyak lagi berdiri organisasi-organisasi Tionghoa, seperti Persatuan Tionghoa (PT), Persatuan Tenaga Indonesia (PTI-Baru), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), dan masih banyak organisasi lainnya.<sup>8</sup>

Sejak akhir tahun lima puluhan ada sebagian anak-anak Tionghoa yang bersekolah di Indonesia, swasta ataupun negeri, lalu melanjutkan pendidikan tingginya di Indonesia atau di luar negeri, seperti di Taiwan, RRC, Singapura, Jerman Barat, Amerika, Kanada dan belakangan juga Australia. Ada juga dari orang-orang Tionghoa yang bersekolah di sekolah Belanda atau sekolah Tionghoa di Indonesia, setelah lulus meneruskan pendidikan tingginya di Indonesia, Belanda atau negeri Tiongkok. Karena perbedaan latar belakang pendidikan diantara kedua generasi Tionghoa ini, maka berbeda pula kultur dan cara pandang mereka tentang Indonesia.

Sampai masuk pada masa Orde Baru, sikap dan pandangan mereka terhadap Indonesia tetap berbeda, ada yang memilih menjadi Warga Negara Indonesia tetapi ada pula yang memilih menjadi Warga Negara Asing. Karena perbedaan pandangan antara orang-orang Tionghoa sendiri dalam menentukan status kewarganegaraannya dan ditambah lagi dengan peristiwa G.30.S/PKI, yang melibatkan sejumlah orang-orang Tionghoa inilah yang membuat pemerintah Indonesia mengambil berbagai

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.56-69.



kebijakan mengenai orang-orang Tionghoa ini.<sup>9</sup> Akibatnya segala ruang gerak dari orang-orang Tionghoa ini, selalu mengalami keterbatasan. Semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, sosial-budaya, dan terutama bidang politiknya menjadi sempit atau bahkan hilang. Karena semua kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia terhadap orang-orang Tionghoa inilah, membuat orang-orang Tionghoa merasa menjadi semakin eksklusif dan berorientasi ke negara Tiongkok dan bahkan terpengaruh oleh paham *komunisme* (paham yang menganut ajaran Karl Mark dan Mao Ze Dong).<sup>10</sup>

Setelah 32 tahun terkukung oleh berbagai macam kebijakan pemerintah Indonesia, sekarang pada *masa reformasi* (masa dimana terjadi perubahan secara radikal di segala bidang kehidupan dalam suatu negara) ini, orang-orang Tionghoa merasa bebas, mereka sudah tidak lagi takut untuk *mengekspresikan* (mengungkapkan) dirinya diberbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang sosial-budaya, seperti banyaknya diadakan pertunjukan-pertunjukan kebudayaan Tionghoa atau bahkan dalam bidang politik, kita dapat melihat sudah banyaknya bermunculan partai-partai Tionghoa, Organisasi Massa (Ormas) Tionghoa, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tionghoa.

Yang menjadi pertanyaan dan masalah penulis adalah kenapa baru sekarang pada masa reformasi ini orang-orang Tionghoa mulai berani kembali menyuarakan hak-haknya ? Semua bidang kehidupan terutama bidang sosial-budaya dan politik yang selama 32 tahun terkukung sekarang mulai banyak dikembangkan kembali,

<sup>9</sup> Peristiwa G.30.S/PKI/1965 tidak hanya merupakan titik balik dari Orde Lama ke Orde Baru, tetapi juga titik balik bagi kebijakan tentang orang Tionghoa dan kebudayaannya di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Soeharto memutuskan bahwa satu-satunya cara bagi penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia adalah melalui asimilasi, solusi ini menjadi solusi nasional sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru berkenaan dengan orang-orang Tionghoa. Lih. I Wibowo, ed., *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi: Masalah Cina*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 1999), hlm.3-4.

<sup>10</sup> Ibid., hlm.4 dan lihat juga Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, terj. Wulandari Supardan (Jakarta : Grafiti Press, 1984), terutama Bab VII. "Kebijakan Kebudayaan Indonesia Terhadap Minoritas Tionghoa", hlm.153-173 dan lampiran 2, hlm.231-235. Bdk. Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1970).



kemanakah semangat politik orang-orang Tionghoa selama 32 tahun ini ? Apakah orang-orang Tionghoa ini menjalankan politik gerakan bawah tanah ? atau mereka memang benar-benar bungkam akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru ? dan Bagaimanakah format (bentuk, susunan) organisasi politik orang-orang Tionghoa sekarang ?

Semua pertanyaan tersebut, mendorong penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul "Partisipasi Politik Orang Tionghoa di Indonesia Pada Periode 1998-1999 : Lahirnya Organisasi Tionghoa".

### **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi masalah pada kehidupan berpolitik masyarakat Tionghoa di Indonesia pada periode 1998-1999 dan tanggapan masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap sikap politik orang-orang Tionghoa pada periode tersebut.

Selain itu penulis juga akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kolonial, Jepang, dan Indonesia dalam menanggapi masalah yang mengenai orang Tionghoa. Pembahasan mengenai kebijaksanaan pemerintah ini sengaja penulis bahas karena semua kebijakan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sikap politik orang Tionghoa menjadi terpecah belah.

### **I.4. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Selain ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai mahasiswa Sastra Cina, dalam penulisan skripsi ini, penulis juga bermaksud mengungkapkan lika-liku, seluk-beluk dan berbagai *intrik* (tipu daya) yang ada dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara masyarakat Tionghoa di Indonesia pada periode 1998-1999.

Selain itu, penulis juga mempunyai tujuan-tujuan lain dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Agar kita semua, baik golongan masyarakat Indonesia dan golongan masyarakat Tionghoa mempunyai pandangan-pandangan berpolitik, berbangsa dan bernegara yang baik dan benar di Indonesia.
2. Agar terjalin kerjasama yang baik dan benar antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa.
3. Untuk menghilangkan batasan-batasan yang ada antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia.
4. Untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang kurang baik terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia, begitu pula sebaliknya agar orang-orang Tionghoa dimanapun mereka berada tidak menganggap bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang *rasisme* (paham yang menganut aliran yang berdasarkan ras agama, warna kulit, golongan, dan suku).
5. Peralihan masa dari Orde Baru ke Orde Reformasi membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut pun dirasakan oleh orang Tionghoa di Indonesia, diantaranya adalah perubahan dalam bidang politik. Untuk itulah penulis ingin mengungkapkan seberapa besar *partisipasi* (peran serta) politik orang Tionghoa di Indonesia pada masa sekarang.

#### **1.5. Hipotesa Penulisan**

Dengan mengadakan penelitian mengenai sikap politik orang-orang Tionghoa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat mereka dengan masyarakat Indonesia pada tahun 1998-1999, maka diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menunjukkan arah yang benar mengenai partisipasi politik orang Tionghoa pada periode tersebut dan juga disertai fakta-fakta yang relevan guna memperkuat penelitian ini.

Diharapkan juga, agar partisipasi politik yang sekarang sudah nyata-nyata ditunjukkan oleh orang-orang Tionghoa ini, akan dapat diketahui dan dirasakan oleh



seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga diharapkan menambah semarak dunia politik di tanah air ini.

## **I.6. Metode Penulisan**

Dalam pencarian data ini, penulis mengumpulkan data atas dasar pada partisipasi politik orang-orang Tionghoa dari zaman penjajahan, data ini merupakan fakta yang perlu dianalisis untuk mengacu pada acuan yang utama sehingga terbentuk sebuah tulisan sejarah. Acuan yang paling utama adalah partisipasi politik orang-orang Tionghoa pada masa sekarang yaitu pada masa reformasi, tepatnya data-data tahun 1997-1998 sampai terbentuknya partai-partai Tionghoa.

Untuk mengungkapkan dengan jelas dan baik masalah dalam penelitian ini, maka penulis didukung dengan data dan sumber-sumber yang layak. Oleh karena itu metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data secara garis besar ada dua macam, yaitu :

### **1. Library Research ( Penelitian Kepustakaan )**

Yaitu dengan mempelajari data dari buku-buku, majalah, dan koran-koran sebagai dasar untuk memperoleh bahan-bahan yang berguna untuk lebih mendukung topik penelitian, juga membaca kembali catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Field Research ( Penelitian Lapangan )**

Yaitu dengan melakukan penelitian yang langsung mendatangi objek penelitian. Adapun metode ini mempunyai dua cara penelitian, antara lain:

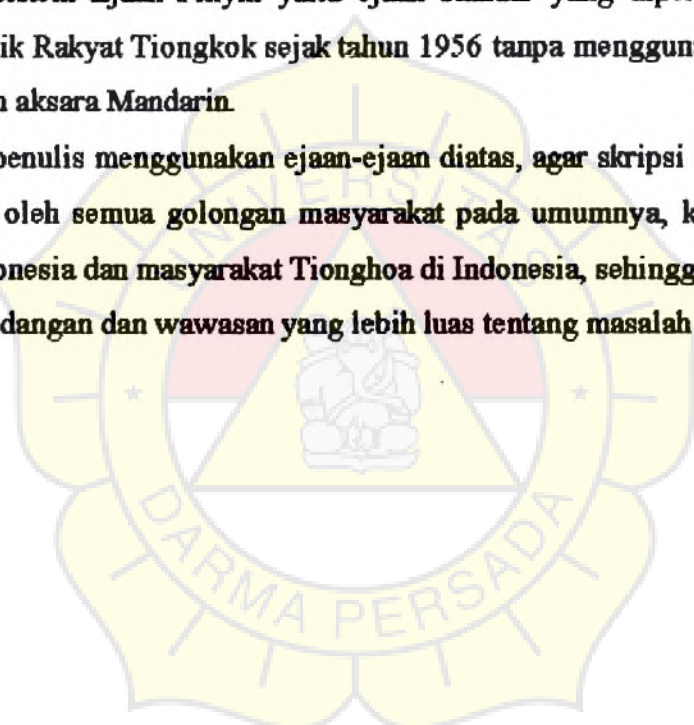
#### **a. Interview ( Wawancara )**

Yaitu dengan langsung mengadakan tanya-jawab kepada para ahli politik masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia, antara lain dengan ketua, dan beberapa anggota dari Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Selain itu penulis juga akan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa orang Tionghoa Indonesia dan beberapa orang rakyat Indonesia.

### **I.8. Sistem Ejaan**

Penulisan skripsi ini akan menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dalam bahasa Indonesia, dimana bahasa Indonesia ini adalah merupakan bahasa baku yang secara resmi dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1972. Untuk kata-kata serapan dari bahasa asing, penulis akan menerjemahkannya dalam EYD bahasa Indonesia. Selain itu, untuk nama-nama dalam bahasa Tionghoa penulis hanya akan menggunakan Sistem Ejaan Pinyin yaitu ejaan standar yang dipergunakan secara resmi di Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1956 tanpa menggunakan huruf Han, yang merupakan aksara Mandarin.

Tujuan penulis menggunakan ejaan-ejaan diatas, agar skripsi ini dapat dibaca dan dimengerti oleh semua golongan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Tionghoa di Indonesia, sehingga pembaca akan mempunyai pandangan dan wawasan yang lebih luas tentang masalah penelitian ini.





b. Observasi ( Pengamatan )

Yaitu dengan melihat secara langsung objek riset di Glodok, Grogol, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal penulis, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kehidupan politik orang-orang Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Penulisan Skripsi ini bersifat deskriptif argumentatif yaitu menceritakan suatu penelitian disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **L7. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dan tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

- Bab I : Pada bab ini, penulis akan menulis tentang latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, hipotesa penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan, dan terakhir adalah sistem ejaan yang digunakan penulis.
- Bab II : Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia dari masa kolonial sampai dengan akhir masa Orde Baru.
- Bab III: Pada bab ini, penulis akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pada masa reformasi yang diambil oleh pemerintahan Presiden B.J. Habiebie terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia sampai terbentuknya partai-partai Tionghoa antara tahun 1998-1999.
- Bab IV: Bab ini, penulis akan membahas tentang Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, dimana partai ini adalah salah satu bentuk partisipasi politik orang-orang Tionghoa di Indonesia. Untuk itu, Penulis akan mengulas semua hal yang menyangkut Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia.
- Bab V: Pada bagian penutup, penulis akan membuat suatu uraian dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya.